



2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Inspektorat Kota Magelang

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2
Magelang 56101

(0293) 363646

inspektoratmglkota@yahoo.com



LKjIP

PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi, berkat Rahmat dan Inayah-NYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Magelang Tahun 2017 telah selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun bisa diukur dari sisi efektifitas, dan efisiensi serta ekonomisnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dasar penyusunan laporan kinerja seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap (SKPD) sehingga SKPD harus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya berisi mengenai target dari sasaran yang dicapai selama periode satu tahun anggaran yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Inspektorat Kota Magelang juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi Aparatur Inspektorat Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.



Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan hasil

kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Magelang Tahun 2017 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan serta menunjukkan kesungguhan dan tekad untuk mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan akuntabel. Hal ini tak lain untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) yang diidam-idamkan seluruh komponen masyarakat.

Kami berharap laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif dan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Kota Magelang dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat juga merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Magelang Tahun 2017 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Magelang Tahun 2017 ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja.

Magelang, Februari 2018


INSPEKTUR KOTA MAGELANG

Drs. DJATMO WAHYUDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19581115 198503 1 014

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Gambaran Umum Organisasi	3
D. Dasar Hukum	6
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Visi dan Misi	9
C. Tujuan dan Sasaran	11
D. Strategi dan Kebijakan	11
E. Sasaran Kinerja	17
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	20
B. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	21
C. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	23
D. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis.....	24
E. Akuntabilitas Keuangan	28
BAB IV	
PENUTUP	30
A. Simpulan	30
B. Strategi Peningkatan Kinerja	30
LAMPIRAN	
1. Rencana Strategis Inspektorat Kota Magelang Tahun 2016 – 2021	
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017	
3. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2017	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Kota Magelang ini adalah uraian terinci dari capaian kinerja sasaran Inspektorat, yang merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja secara menyeluruh, dan bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja, sebagaimana yang disyaratkan peraturan perundang-undangan.

Laporan yang disusun ini diharapkan merupakan salah satu alat observasi untuk melakukan introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat pimpinan. Oleh karenanya laporan ini diharapkan secara terus-menerus mendorong perbaikan proses manajemen Inspektorat Kota Magelang.

Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran Inspektorat, diharapkan dapat digambarkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, yang tentunya merupakan keberhasilan seluruh Perangkat Daerah, serta partisipasi masyarakat secara umum. Sedangkan kegagalan akan dijadikan bahan evaluasi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Pokok-pokok capaian kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2017, adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Sasaran:

Inspektorat Kota Magelang berupaya mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Magelang Tahun 2017, yang tentunya kedepan menjadi perhatian untuk penyempurnaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Magelang,

INSPEKTUR KOTA MAGELANG



Drs. DJATMO WAHYUDI

Pembina Utama Muda

NIP. 19581115 198503 1 014

v

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Inspektorat Kota Magelang

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKjIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Magelang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel

merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Magelang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Kota Magelang Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

C. Gambaran Umum Organisasi

1. Bidang Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Kota Magelang merupakan

perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kota Magelang dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Inspektorat Kota Magelang.

2. Core Area

Inspektorat Kota Magelang mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi, Inspektorat Kota Magelang didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana pendukung sebagai berikut:

- Inspektorat Kota Magelang didukung oleh 27 (dua puluh tujuh) Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

✚ Pejabat Eselon II	sebanyak 1 orang
✚ Pejabat Eselon III	sebanyak 2 orang
✚ Pejabat Eselon IV	sebanyak 2 orang
✚ Pejabat Fungsional	sebanyak 16 orang
✚ Staf	sebanyak 6 orang

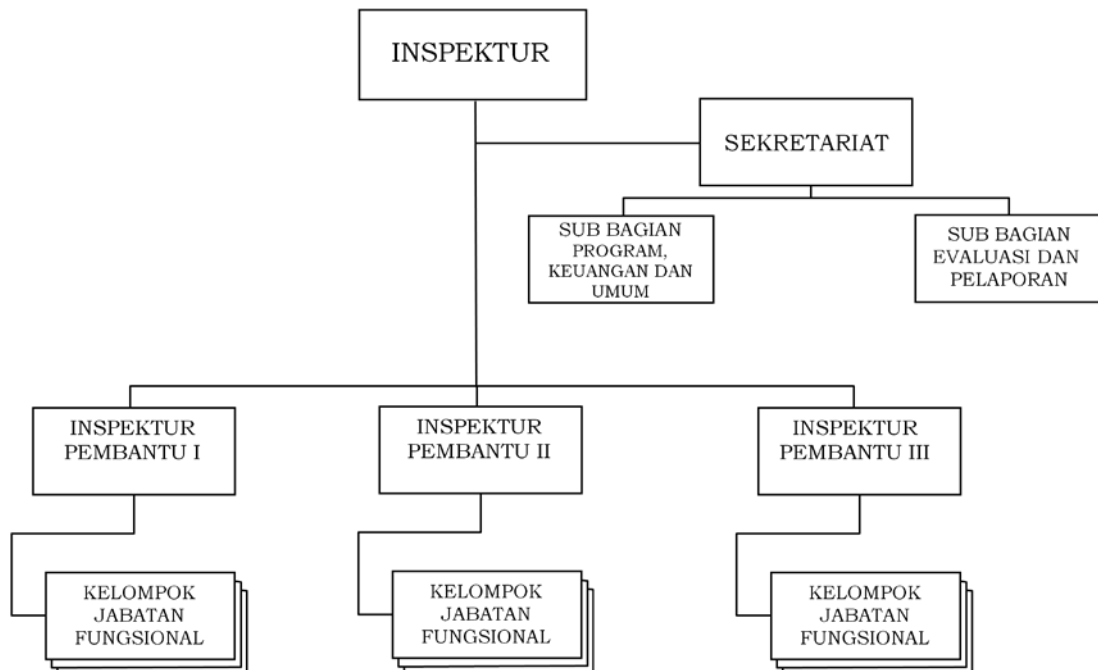
Komposisi jenjang pendidikan pegawai yang ada di Inspektorat yaitu

Magister (S2) sebanyak 6 (enam) orang, S1 sebanyak 15 (lima belas) orang, D3 sebanyak 2 (dua) orang, SMA sebanyak 3 (tiga) orang dan SMP sebanyak 1 (satu) orang.

- Sarana prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:
 - ✚ Mesin Ketik Elektrik sebanyak 1 (satu) buah
 - ✚ Perangkat Komputer berupa Personal Komputer sebanyak 20 (dua puluh) unit, notebook/laptop sebanyak 13 (tiga belas) unit, printer inkjet/laserjet sebanyak 21 (dua puluh satu) serta scanner sebanyak 1 (satu) unit
 - ✚ LCD Proyektor + screen brite sebanyak 1 set
 - ✚ Wireless sound sebanyak 1 unit
 - ✚ Sarana transportasi berupa kendaraan dinas operasional roda empat sebanyak 5 (lima) unit dan kendaraan roda dua sebanyak 15 (lima belas) unit
 - ✚ Peralatan/perlengkapan kerja berupa meja, kursi dan lain-lain yang cukup tersedia.

3. Susunan Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA MAGELANG



Perwal No. 29 tahun 2016

D. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Magelang Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih awal menyeleraskan visi dan misinya dengan potensi dan kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek guna memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah.

Atas dasar Undang-Undang tersebut Pemerintah Kota Magelang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2016.

Dalam RPJPD dan RPJMD memuat Visi dan Misi yang menjadi acuan bagi semua dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah maupun dokumen perencanaan Satuan kerja Perangkat Daerah Kota Magelang.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Magelang telah ditetapkan rencana menyeluruh dan terpadu yang meliputi penetapan langkah-langkah kegiatan dengan memperhatikan sumber daya serta kondisi lingkungan yang dihadapi guna memberikan kesatuan pandang dalam pelaksanaannya.

Penentuan faktor-faktor keberhasilan Inspektorat Kota Magelang dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yaitu:

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dengan memanfaatkan program diklat yang ada;
- Meningkatkan pelayanan sesuai dengan sarana prasarana yang ada;
- Memanfaatkan dana dalam APBD se-efisien dan seefektif mungkin serta mencegah kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN);
- Memanfaatkan potensi aparatur secara profesional untuk meningkatkan kinerja pengawasan;

Merujuk dan faktor-faktor keberhasilan diatas, dengan komitmen untuk meningkatkan kinerja Inspektorat dalam mewujudkan *Good Governance* menuju *Clean Government*, maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

B. Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan gambaran Kota Magelang dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2016-2021.

1. Visi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (*Future*) yang realistis atas cara pandang jauh ke depan kemana instansi atau organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan kondisi masa depan yang dicita-citakan dan merupakan komitmen bersama tanpa ada paksaan.

Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2016-2021 yaitu:

"Magelang sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas yang Dilandasi Masyarakat yang Sejahtera dan Religius".

Makna dari Visi dimaksud adalah:

- 1) Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan dan sektor pendidikan;
- 2) Sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada;

- 3) Dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah.
- 4) Peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi.
- 5) Masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan warga masyarakat.

2. Misi

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah:

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan;
- 3) Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang;
- 5) Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan

peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Dari misi yang telah ditetapkan tersebut Inspektorat Kota Magelang berperan aktif dalam mewujudkan pencapaian misi kesatu dalam pembangunan daerah.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Magelang.

Inspektorat dalam mewujudkan Misi Kesatu dari Visi Pembangunan Kota Magelang, Inspektorat berupaya berperan aktif mendukung dalam pencapaian tujuan "*mewujudkan reformasi birokrasi (tata kelola pemerintahan) dengan aparatur profesional dan berintegritas*" dengan sasaran "*meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif*".

D. Strategi dan Kebijakan

Strategi Inspektorat untuk pencapaian sasaran *meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif*, adalah:

- ✚ Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja pemerintahan yang profesional dan akuntabel sesuai norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur, dengan kebijakan:
 - 1) Pengukuran kinerja pembangunan terintegrasi;
 - 2) Pengendalian manajemen penyerapan anggaran pembangunan;
 - 3) Meningkatkan koordinasi pemahaman tentang SAKIP dan pembinaan kepada seluruh OPD;
 - 4) Melaksanakan Review dan Evaluasi atas LKjIP dan rekomendasi atas hasil review yang dilakukan;
 - 5) Meningkatkan kualitas penyusunan LKjIP disemua SKPD melalui penguatan pemahaman terkait dengan pengukuran kinerja;
 - 6) Mengoptimalkan review dan evaluasi LKjIP dan SAKIP Kota
 - 7) Melakukan Evaluasi terhadap ketercapaian Indikator Kinerja Daerah (IKU) Kota dan SKPD;
 - 8) Meningkatkan kapabilitas APIP;

- 9) Penataan dan implementasi sistem dan prosedur pengawasan keuangan;
- 10) Meningkatkan efektifitas SPIP pada SKPD;
- 11) Optimalisasi peran Aparat Pengawas Internal Instansi Pemerintah serta penguatan Satgas SPIP di SKPD;









Kebijakan merupakan wujud nyata dari strategi yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu dalam proses organisasi

Dalam penetapan kebijakan *Top Leader* harus mampu memformulasikan kebijakan yang menjadi pedoman, suatu mekanisme tindak lanjut pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga setiap pejabat dan pelaksana dalam organisasi mengetahui adanya dukungan dalam pelaksanaan tugas dan implementasi keputusan.

Perumusan Kebijakan yang dijabarkan dalam nincian program dan kegiatan Inspektorat digambarkan Penjabaran Program dan Kegiatan Tahun 2017 sebagai berikut:

**PENJABARAN
RINCIAN KEGIATAN TAHUN 2017**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan
<p>Mewujudkan reformasi birokrasi (tata kelola pemerintahan) dengan aparatur professional dan berintegritas.</p>	<p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif</p>	<p>Peningkatan kualitas system manajemen kinerja pemerintahan yang professional dan akuntabel sesuai norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja pembangunan terintegrasi 2. Pengendalian manajemen penyerapan anggaran pembangunan 3. Meningkatkan koordinasi pemahaman tentang SAKIP dan pembinaan kepada seluruh OPD 4. Melaksanakan review dan Evaluasi atas LKjIP dan Rekomendasi atas hasil review yang dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengawasan sistem internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Evaluasi LAKIP <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Tindak Lanjut Temuan Pengawasan ✚ Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala ✚ Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Evaluasi LAKIP <ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Review Laporan Keuangan ✚ Inventarisasi Kesesuaian antara Data Belanja, Rincian Belanja pada DPA SKPD dengan Pelaksanaan Anggaran ✚ Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran <ol style="list-style-type: none"> 2. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan
			<p>5. Meningkatkan kualitas penyusunan LKjIP di semua SKPD melalui penguatan pemahaman terkait dengan pengukuran kinerja</p> <p>6. Mengoptimalkan Review dan Evaluasi LKjIP dan SAKIP Kota</p> <p>7. Melakukan Evaluasi Terhadap ketercapaian Indikator Kinerja Daerah (IKU) Kota dan SKPD</p> <p>8. Meningkatkan kapabilitas APIP</p>	<p>Kegiatan:  Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</p> <p>1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</p> <p>Kegiatan:  Evaluasi LAKIP</p> <p>1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</p> <p>Kegiatan:  Evaluasi LAKIP</p> <p>1. Program sinergitas Penerapan SPI pada SKPD</p> <p>Kegiatan:  Inventarisasi Temuan Pengawasan</p> <p>2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</p> <p>Kegiatan:  Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan  Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan</p> <p>1. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan</p> <p>Kegiatan:  Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan  Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan
			<p>9. Penataan dan implementasi system dan prosedur pengawasan keuangan</p> <p>10. Meningkatkan efektifitas SPIP pada SKPD</p> <p>11. Optimalisasi peran Aparat Pengawas internal Pemerintah serta penguatan Satgas SPIP di SKPD</p>	<p>✦ Pengelolaan Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor</p> <p>✦ Pengembangan Kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah</p> <p>1. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan</p> <p>Kegiatan:</p> <p>✦ Penyusunan kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</p> <p>1. Program Sinergitas Penerapan SPI pada SKPD</p> <p>Kegiatan:</p> <p>✦ Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>✦ Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif</p> <p>1. Program Sinergitas Penerapan SPI pada SKPD</p> <p>Kegiatan:</p> <p>✦ Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p>

Disamping kegiatan prioritas pencapaian sasaran, strategi, kebijakan umum dan program pembangunan daerah tersebut di atas, Inspektorat Kota Magelang juga mengupayakan dengan kegiatan pendukung dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam indikator program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan:
 - a. Penelitian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - c. Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - d. Penyelesaian Kerugian Negara.
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan Website.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - d. Penyusunan RKA SKPD;
 - e. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD.
 - f. Penyusunan Rencana Kerja SKPD.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - f. Penyediaan alat tulis kantor;
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyediaan bahan logistik kantor;
 - j. Penyediaan makanan dan minuman;
 - k. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
6. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor;
 - b. Peningkatan kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah.
 7. Program Penataan dan penyempunaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;

E. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2017 mencakup sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dengan mengacu Rencana Strategik.

Susunan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedang program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan semua kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahunan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indicator kinerja kegiatan yang meliputi *masukan (input)*, *keluaran (output)*, dan *hasil (outcome)*.

Adapun Ringkasan rencana kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Magelang Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti 2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil review 3. Prosentase LKJIP SKPD dengan nilai baik 4. Nilai LKJIP SKPD 5. Persentase SKPD yang direview LKJIP; 6. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 7. Temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan BPK menurun 8. Penurunan kasus temuan LKPD 9. Penyelesaian TLHP BPK meningkat 10. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal; 	<p>25%</p> <p>75%</p> <p>30%</p> <p>Nilai CC</p> <p>87%</p> <p>60%</p> <p>1%</p> <p>87%</p> <p>85%</p>
2	Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 11. Cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD, saker dan BUMD plus targetnya); 12. Persentase aparat SPIP aktif; 13. Persentase kebijakan system dan prosedur pengawasan 	<p>55%</p> <p>60%</p> <p>70%</p>
3	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 14. Level APIP Kota Magelang menjadi level 3 15. Presentase APIP yang bersertifikat kompetensi meningkat; 16. Presentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat; 	<p>Level 2</p> <p>60%</p> <p>85%</p>

Meningkatnya sinergitas penerapan SPI pada OPD	17. Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil pemeriksaan APIP;	85%
	18. Penurunan temuan ketidakpatuan UU hasil Pemeriksaan APIP;	70%
	19. Persentase implementasi SPIP;	72%

Sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran, diberikan pernyataan keberhasilan atas kinerja yang ingin diwujudkan pada capaian kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2017.

Pernyataan keberhasilan atas kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, yaitu dengan memberi atribut "*melebihi target, mencapai target, dan tidak mencapai target*", dengan perincian sebagai berikut:

NO	NILAI CAPAIAN		ATRIBUT
	%	KETERANGAN	
1	> 100	Di atas seratus persen	Melebihi target
2	= 100	Sama dengan seratus persen	Mencapai target
3	< 100	Kurang dari seratus persen	Tidak mencapai target

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 95 s/d 100 : Sangat Berhasil
- 80 s/d <95 : Berhasil
- 50 s/d <80 : Cukup Berhasil
- 0 s/d <50 : Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang	%	30%	57,62%	187%

	ditindaklanjuti;				
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil review;	%	80%	100%	125%
3	Prosentase LKJIP SKPD dengan nilai baik;	%	40%	60%	150%
4	Nilai LKJIP SKPD	Level	CC	CC	CC
5	Persentase SKPD yang direview LKJIP;	%	35%	59%	169%
6	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;	%	90%	89,02%	99%
7	Penurunan kasus temuan LKPD;	%	2	2	100%
8	Penyelesaian TLHP BPK meningkat;	%	90%	89,02%	99%
9	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal;	%	90%	90%	100%
10	Cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD, saker dan BUMD plus targetnya);	%	60%	95%	106%
11	Persentase zona integritas yang terbentuk;	%	10%	10%	100%
12	Persentase kebijakan system dan prosedur pengawasan;	%	75%	100%	133%
13	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3;	Level	2	3	150%
14	Presentase APIP yang bersertifikat kompetensi meningkat;	%	60%	53,12%	88%
15	Presentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat;	%	65%	50%	77%
16	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil	%	80%	89,69%	113%

17	pemeriksaan APIP; Penurunan temuan ketidapatuan UU hasil	%	60%	60%	100%
18	Pemeriksaan APIP;	%	72%	52%	72%
19	Persentase implementasi SPIP;	%	60%	52%	87%
20	Prosentase aparat SPIP aktif ; Temuan ketidak patuan UU hasil pemeriksaan BPK menurun;	%	60%	114%	190%

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2016	2017
1	Prosentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti;	25%	56%
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil review;	80%	100%
3	Prosentase LKJIP SKPD dengan nilai baik;	26,08%	40%
4	Nilai LKJIP SKPD	CC	CC
5	Persentase SKPD yang direview LKJIP;	26,08%	59%
6	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;	100%	89%
7	Penurunan kasus temuan LKPD;	4	-2
8	Penyelesaian TLHP BPK meningkat;	84,36%	89%
9	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal;	100%	100%
10	Cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD, saker dan BUMD plus targetnya);	50%	95%
11	Persentase zona integritas yang terbentuk;	0%	5%
12	Persentase kebijakan system dan prosedur pengawasan;	66,67%	100%
13	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3;	2	3

14	Presentase APIP yang bersertifikat kompetensi meningkat	46,15%	53%
15	Presentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	100%	53%
16	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil pemeriksaan APIP;	73,46%	74%
17	Penurunan temuan ketidakpatuan UU hasil Pemeriksaan APIP;	62,35%	60%
18	Persentase implementasi SPIP;	50%	52%
19	Prosentase aparat SPIP aktif ;	50%	52%
20	Temuan ketidak patuan UU hasil pemeriksaan BPK menurun;	45,45%	114%

Indikator kinerja pengawasan dalam mendukung mewujudkan misi Kota Magelang dapat ditunjukkan melalui implementasi SPIP pada unit kerja, penyelesaian tindak lanjut hasil-hasil pengawasan, dan capaian tingkat kapabilitas APIP dari capaian indikator tersebut terlihat selama 2 tahun terakhir realisasi kinerja dapat dicapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan Sasaran Strategis pada tahun sampai dengan tahun 2017 dapat diwujudkan.

C. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dari 4(empat) sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 20 Dua Puluh indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kota Magelang adalah sebagai berikut :

No Kinerja	Predikat	Jumlah Indikator
1	Sangat Berhasil	14
2	Berhasil	3
3	Cukup Berhasil	3
4	Kurang Berhasil	0
	Jumlah	20

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam table, sebagai berikut :

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	0 s/d <50	50 s/d <80	80 s/d <95	95 s/d 100
1	Meningkatnya system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	11	98				Sangat Berhasil
2	Meningkatnya penataan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan	3	83			Berhasil	
3	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	3	134				Sangat Berhasil
4	Meningkatnya sinergitas penerapan SPI pada OPD	3	73		Cukup Berhasil		

D. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran 1 :

“Meningkatnya Meningkatkan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH “

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 98% dengan predikat *Sangat Berhasil*

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti;	%	30%	57,62%	187%
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil review;	%	80%	100%	125%
3	Prosentase LKJIP SKPD dengan nilai baik;	%	40%	60%	150%

4	Nilai LKJIP SKPD	Level	CC	CC	CC
5	Persentase SKPD yang direview LKJIP;	%	35%	59%	169%
6	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;	%	90%	89,02%	99%
7	Penurunan kasus temuan LKPD;	%	2	2	100%
8	Penyelesaian TLHP BPK meningkat;	%	90%	89,02%	99%
9	Penurunan temuan ketidakpatuan UU hasil Pemeriksaan APIP;	%	60%	53,12%	88%
10	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal;	%	90%	90%	100%
11	Persentase zona integritas yang terbentuk;	%	10%	10%	100%

Sasaran 2 :**“Meningkatnya penataan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan “**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan **penataan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan** dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 82,33% dengan predikat *Berhasil*

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase kebijakan system dan prosedur pengawasan;	%	75%	100%	133%
2	Cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD, saker dan BUMD plus	%	60%	95%	106%

3	targetnya); Prosentase aparat SPIP aktif ;	%	60%	52%	87%
---	---	---	-----	-----	-----

Sasaran 3 :

“Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan “

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 134 % dengan predikat *Sangat Berhasil*

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3;	Level	2	3	150%
2	Presentase APIP yang bersertifikat kompetensi meningkat;	%	60%	53,12%	88%
3	Presentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat;	%	65%	50%	77%

Sasaran 4 :

“Mningkatnya sinergitas penerapan SPI pada OPD “

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Meningkatkan sinergitas penerapan SPI pada OPD dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 73 % dengan predikat *Berhasil*

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil pemeriksaan APIP;	%	75%	100%	133%
2	Penurunan temuan ketidakpatuan UU hasil Pemeriksaan APIP;	%	60%	60%	100%
3	Persentase implementasi SPIP;	%	72%	52%	72%

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2016	2017
Sasaran 1 : “Meningkatnya Meningkatkan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH “			
1	Prosentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektora yang ditindaklanjuti;	30%	57,62%
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil review;	80%	100%
3	Prosentase LKJIP SKPD dengan nilai baik;	26,08%	40%
4	Nilai LKJIP SKPD	CC	CC
5	Persentase SKPD yang direview LKJIP;	26,08%	59%
6	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;	100%	89%
7	Penurunan kasus temuan LKPD;	4	-2
8	Penyelesaian TLHP BPK meningkat;	84,36%	89%
9	Penurunan temuan ketidakpatuan UU hasil Pemeriksaan APIP;	45,45%	114%

10	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal;	100%	100%
11	Persentase zona integritas yang terbentuk;	0%	5%
Sasaran 2 : “Meningkatnya penataan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan “			
1	Persentase kebijakan system dan prosedur pengawasan;	66,67%	100%
2	Cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD, saker dan BUMD plus targetnya);	50%	95%
3	Prosentase aparat SPIP aktif ;	50%	52%
Sasaran 3 : “Meningkatnya penataan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan “			
1	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3;	2	3
2	Presentase APIP yang bersertifikat kompetensi meningkat	46,15%	53%
3	Presentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	100%	53%
Sasaran 4 : “Meningkatnya sinergitas penerapan SPI pada OPD “			
1	Persentase implementasi SPIP;	50%	52%
2	Penurunan temuan ketidakpatuan UU hasil Pemeriksaan APIP;	62,35%	0%
3	Persentase implementasi SPIP;	50%	52%

E. Akuntabilitas Keuangan

Aspek keuangan sebagai unsur penunjang pelaksanaan kegiatan rutin Inspektorat Kota Magelang Tahun Anggaran 2017. Adapun perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2017 adalah sebagai berikut::

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Inspektorat Kota Magelang Tahun Anggaran 2017

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)	%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas/Operasional	3.000.000,-	2.545.500,-	84,85
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.000.000,-	4.353.200,-	39,57
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8.800.000,-	4.611.800,-	52,41
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60.000.000,-	55.087.000,-	91,81
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.500.000,-	2.468.900,-	98,76
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.000.000,-	9.927.500,-	99,28
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,-	4.623.650,-	77,06
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,-	4.864.600,-	97,29
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	815.000,-	690.000,-	84,66
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000,-	26.487.850,-	66,22
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	134.980.000,-	134.658.000,-	99,76
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	108.883.000,-	103.073.900,-	94,66
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	45.750.000	44.502.500,-	97,27
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	9.000.000,-	8.985.000	99,83
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	144.715.000,-	117.774.730,-	81,38
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	22.565.000,-	20.749.000,-	91,95
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.074.000,-	10.901.000,-	98,44

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)	%
18	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000,-	1.941.700,-	97,09
19	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3.000.000,-	2.941.500,-	98,05
20	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD	4.000.000,-	3.981.500,-	99,54
21	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	15.000.000,-	14.262.000	95,08
22	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) SKPD	3.000.000,-	2.981.000,-	99,37
23	Penelolaan Website	10.000.000,-	9.990.000,-	99,90
24	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	380.032.000,-	292.289.150,-	76,91
25	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang	107.053.000,-	53.974.200,-	50,42
26	Inventarisasi Temuan Pengawasan	45.248.000,-	31.650.500,-	69,95
27	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	224.662.000,-	224.114.200,-	99,76
28	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	78.126.000,-	72.980.620,-	93,41
29	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	34.413.000,-	33.881.350,-	98,46
30	Evaluasi LAKIP	46.477.000,-	36.595.060,-	78,74
31	Review Laporan Keuangan	45.557.000,-	39.983.200,-	87,77
32	Penelitian LP2P	19.551.000,-	7.823.800,-	40,02
33	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	46.032.000,-	39.481.700,-	85,77
34	Penyelenggaraan SPIP	51.827.000,-	42.443.710,-	81,89
35	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	60.220.000,-	48.730.200,-	80,92
36	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	45.115.000,-	39.209.850,-	86,91
37	Pemantauan LHKASN	36.000.000,-	22.311.200,-	61,98
38	Penyelesaian Kerugian Negara	203.386.000,-	148.177.900,-	72,86

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)	%
39	Pemantauan dan evaluasi gratifikasi	38.825.000,-	32.842.650,-	84,59
40	Review Pengadaan barang/jasa dan penyerapan anggaran	24.753.000,-	15.694.600,-	63,40
41	Review dokumen perencanaan dan penganggaran	38.333.000,-	28.875.000,-	75,33
42	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi sapu bersih pungutan liar	125.279.000,-	106.594.000,-	85,09
43	Pengelolaan Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor	36.426.000,-	29.916.800,-	82,13
44	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	153.000.000,-	109.181.200,-	71,36
45	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	20.530.000,-	14.693.500,-	71,57
Jumlah		2.521.927.000,-	2.063.846.220,-	81,84

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2017 disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas aparat pengawasan dalam kurun waktu 1 tahun sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kegiatan Pengawasan maka berdasarkan penjelasan pada bab – bab sebelumnya dapat dikemukakan kesimpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat Kota Magelang tahun 2017 dari keseluruhan sasaran baik program/kegiatan dengan capaian kinerja 94,84 % dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 5.179.075.862 serta mengoptimalkan keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung operasional pengawasan, sumber daya aparatur pengawasan yang ada walaupun tidak sebanding dengan lingkup pengawasan dan belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas di bidang pengawasan.

Dalam upaya mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum dicapai, maka untuk masa yang akan datang akan ditempuh langkah yang lebih konkrit antara lain melalui:

- Usulan anggaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2900/SJ Tanggal 23 September 2008 dengan prioritas anggaran minimal 1 % dari APBD untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan yang dialokasikan untuk pelaksanaan pengawasan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawas;
- Pengukuran jumlah personil dan pengaturan alokasi waktu yang harus disediakan dalam setiap kegiatan;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat akan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan agar diadakan kegiatan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) bagi para pegawai Inspektorat;
- Meningkatkan komunikasi dengan aparatur pemerintahan dan masyarakat agar lebih berpartisipasi dan memahami peran

penting pembinaan dan pengawasan;

- Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus kepada SKPD yang belum menindaklanjuti hasil temuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) sehingga tidak terjadi adanya sisa temuan yang belum ditindaklanjuti.
- Mengusulkan penetapan KUA-PPAS dilaksanakan pada semester 2 sehingga penyusunan RKA SKPD tidak dalam waktu singkat dan sesuai jadwal.

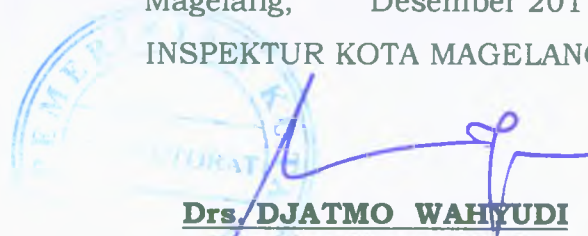
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Magelang ini merupakan upaya mendorong terlaksananya tata pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), mendorong tumbuhnya tata pemerintahan yang akuntabel, memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja pemerintah dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini dibuat secara berkelanjutan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian laporan kinerja ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan serta perbaikan-perbaikan yang lebih memadai, terutama dalam menganalisis kinerja organisasi, sehingga implementasi pelaporan akuntabilitas lebih baik dimasa yang akan datang.

Demikianlah Laporan Kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2017 dibuat, semoga dapat menjadi tambahan masukan dan acuan serta sebagai dasar pertanggungjawaban entitas pelaporan Inspektorat Kota Magelang.

Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Inspektorat Kota Magelang.

Magelang, Desember 2017
INSPEKTUR KOTA MAGELANG



Drs. DJATMO WAHYUDI
Pembina Utama Muda
NIP/ 19581115 198503 1 014

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA MAGELANG
TAHUN 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Cara Mencapai Tujuan/Sasaran	
			Kebijakan	Program/Kegiatan
Mewujudkan reformasi birokrasi (tata kelola pemerintahan) dengan aparatur profesional dan berintegritas.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif	Peningkatan kualitas system manajemen kinerja pemerintahan yang professional dan akuntabel sesuai norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	Pengukuran kinerja pembangunan terintegrasi	Program pengawasan sistem internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			Pengendalian manajemen penyerapan anggaran pembangunan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			Meningkatkan koordinasi pemahaman tentang SAKIP dan pembinaan kepada seluruh OPD	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
			Melaksanakan review dan Evaluasi atas LKjIP dan Rekomendasi atas hasil review yang dilakukan	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
			Meningkatkan kualitas penyusunan LKjIP di semua SKPD melalui penguatan pemahaman terkait dengan pengukuran kinerja	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
			Mengoptimalkan Review dan Evaluasi LKjIP dan SAKIP Kota	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
			Melakukan Evaluasi Terhadap ketercapaian Indikator Kinerja Daerah (IKU) Kota dan SKPD	Program sinergitas Penerapan SPI pada SKPD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Cara Mencapai Tujuan/Sasaran	
			Kebijakan	Program/Kegiatan
			Meningkatkan kapabilitas APIP	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
			Penataan dan implementasi system dan prosedur pengawasan keuangan	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
			Meningkatkan efektifitas SPIP pada SKPD	Program sinergitas Penerapan SPI pada SKPD
			Optimalisasi peran Aparat Pengawas internal Pemerintah serta penguatan Satgas SPIP di SKPD	Program sinergitas Penerapan SPI pada SKPD

Magelang, Desember 2017
INSPEKTUR KOTA MAGELANG

Drs. DJATMO WAHYUDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19581115 198503 1 014



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. DJATMO WAHYUDI

Jabatan : INSPEKTUR KOTA MAGELANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. SIGIT WIDYONINDITO, M.T.

Jabatan : WALIKOTA MAGELANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, November 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ttd

ttd

Ir. SIGIT WIDYONINDITO, M.T.

Drs. DJATMO WAHYUDI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
INSPEKTORAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH	1. Prosentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti 2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil review 3. Prosentase LKJIP SKPD dengan nilai baik 4. Nilai LKJIP SKPD 5. Persentase SKPD yang direview LKJIP; 6. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 7. Temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan BPK menurun 8. Penurunan kasus temuan LKPD 9. Penyelesaian TLHP BPK meningkat 10. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal;	25% 75% 30% CC 25% 87% 60% 1 87% 85%
2	Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan	11. Cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD, saker dan BUMD plus targetnya); 12. Persentase aparat SPIP aktif; 13. Persentase kebijakan system dan prosedur pengawasan	55% 60% 70%
3	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	14. Level APIP Kota Magelang menjadi level 3 15. Presentase APIP yang bersertifikat kompetensi meningkat; 16. Presentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat;	Level 2 55% 60%

Meningkatnya sinergitas penerapan SPI pada OPD	17. Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil pemeriksaan APIP;	85%
	18. Penurunan temuan ketidakpatuan UU hasil Pemeriksaan APIP;	70%
	19. Persentase implementasi SPIP;	72%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 282.095.000,00	APBD
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 330.913.000,00	APBD
3. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 38.074.000,00	APBD
4. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 10.000.000,00	APBD
5. Peningkatan sitem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 1.650.889.000,00	APBD
6. Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa Dan aparatur pengawasan	Rp. 189.426.000,00	APBD
7. Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan;	Rp. 20.530.000,00	APBD

Magelang Nopember 2017

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

INSPEKTUR KOTA MAGELANG



DJATMO WAHYUDI

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2017**

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	282.095.000	250.318.000							
4.02.4.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	2.545.500							
	<u>Keluaran (Output):</u> jumlah surat yang dapat diselesaikan <u>Hasil (Outcome):</u> Tertib pengelolaan administrasi surat menyurat			925	1231	surat	100	100	%	
4.02.4.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11.000.000	4.353.200							
	<u>Keluaran (Output):</u> Biaya langganan telepon <u>Hasil (Outcome):</u> Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas			12	12	bulan	100	100	%	
4.02.4.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.800.000	4.611.800							
	<u>Keluaran (Output):</u> Jumlah pajak kendaraan dinas <u>Hasil (Outcome):</u> Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas			16	16	unit	100	100	%	
4.02.4.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	60.000.000	55.087.000							
	<u>Keluaran (Output):</u> Jumlah honorarium pengelolaan keuangan SKPD <u>Hasil (Outcome):</u> Tertib administrasi keuangan			12	12	bulan	100	100	%	
4.02.4.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.500.000	2.468.900							
	<u>Keluaran (Output):</u> Jumlah sarana prasarana kebersihan kantor <u>Hasil (Outcome):</u> Peningkatan kenyamanan kantor			15	15	jenis	100	100	%	
4.02.4.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000	9.927.500							
	<u>Keluaran (Output):</u> Jumlah alat tulis kantor <u>Hasil (Outcome):</u> Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas			14	14	jenis	100	100	%	
4.02.4.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000	4.623.650							
	<u>Keluaran (Output):</u> Jumlah cetakan dan penggandaan <u>Hasil (Outcome):</u> Peningkatan tertib administrasi pengelolaan naskah dinas			3	3	jenis	100	100	%	
4.02.4.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000	4.864.600							
	<u>Keluaran (Output):</u> Jumlah langganan surat kabar <u>Hasil (Outcome):</u>			44	44	jenis				

	Peningkatan pengetahuan /informasi aparat pengawasan						100	100	%	
4.02.4.02.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	815.000	690.000							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah pengisian tabung gas <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas			6	6	kali	100	100	%	
4.02.4.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000	26.487.850							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah jamuan makan dan minum pegawai dan tamu kantor <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas			21	21	keg	100	100	%	
4.02.4.02.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	134.980.000	134.658.000							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan kinerja			13	13	keg	100	100	%	
4.02.4.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	330.913.000	295.085.130							
4.02.4.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	108.883.000	103.073.900							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya perlengkapan gedung kantor <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas			39	39	unit	100	100	%	
4.02.4.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	45.750.000	44.502.500							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya pengadaan peralatan berupa laptop <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas			5	5	unit	100	100	%	
4.02.4.02.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.000.000	8.985.000							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah pengadaan /pemeliharaan tanaman hias dan perlengkapannya <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan kenyamanan dan keindahan ruangan kantor			9	9	jenis	100	100	%	
4.02.4.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	144.715.000	117.774.730							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas			20	20	unit	100	100	%	
4.02.4.02.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	22.565.000	20.749.000							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Terpeliharanya peralatan kantor <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas			42	42	jenis	100	100	%	
4.02.4.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	38.074.000	37.008.700							

4.02.4.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11.074.000	10.901.000							
	<u>Keluaran (Output):</u> Jumlah laporan capaian kinerja <u>Hasil (Outcome):</u> Evaluasi dan peningkatan kinerja			4	4	lap	100	100	%	
4.02.4.02.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.000.000	1.941.700							
	<u>Keluaran (Output):</u> Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran <u>Hasil (Outcome):</u> Tertib pengelolaan administrasi anggaran dan keuangan			1	1	bendel	100	100	%	
4.02.4.02.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.000.000	2.941.500							
	<u>Keluaran (Output):</u> Jumlah laporan akhir tahun <u>Hasil (Outcome):</u> Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan			1	1	buku	100	100	%	
4.02.4.02.01.06.06	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	4.000.000	3.981.500							
	<u>Keluaran (Output):</u> Jumlah laporan renja <u>Hasil (Outcome):</u> Peningkatan kinerja dan tertib pengelolaan perencanaan SKPD			2	2	dok	100	100	%	
4.02.4.02.01.06.08	Penyusunan RKA-SKPD	15.000.000	14.262.000							
	<u>Keluaran (Output):</u> Jumlah RKA dan RKPA SKPD <u>Hasil (Outcome):</u> Tertib pengelolaan perencanaan anggaran SKPD			2	2	dok	100	100	%	
4.02.4.02.01.06.27	Penyusunan LAKIP SKPD	3.000.000	2.981.000							
	<u>Keluaran (Output):</u> Tersusnya buku LAKIP SKPD <u>Hasil (Outcome):</u> Peningkatan kinerja SKPD			1	1	buku	100	100	%	
4.02.4.02.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.650.889.000	1.317.652.890							
4.02.4.02.01.15.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	380.032.000	292.289.150							
	<u>Keluaran (Output):</u> Jumlah obyek pemeriksaan (obrik) <u>Hasil (Outcome):</u> Peningkatan kinerja SKPD			80	77	obrik	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.02	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	107.053.000	53.974.200							
	<u>Keluaran (Output):</u> Jumlah obyek pemeriksaan (obrik) <u>Hasil (Outcome):</u> Peningkatan kinerja SKPD dan disiplin PNS			12	8	obrik	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.05	Inventarisasi temuan pengawasan	45.248.000	31.650.500							
	<u>Keluaran (Output):</u> Pemutakhiran data tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK <u>Hasil (Outcome):</u>			3	3	kegiatan				

	Terselesaikannya Tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK (murni /tahun berjalan)						100	100	%	
4.02.4.02.01.15.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	224.662.000	224.114.200							
	<u>Keluaran (Output):</u> Data pendukung tindak lanjut rekomendasi inspektorat kota Inspektorat Provinsi dan pending BPK serta sosialisasi Sin Was Online <u>Hasil (Outcome):</u> Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan			1.000	842	rekomen dasi	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	78.126.000	72.980.620							
	<u>Keluaran (Output):</u> Sinkronisasi tindak lanjut pengawasan <u>Hasil (Outcome):</u> Pemahaman tindak lanjut atas hasil pemeriksaan			4	4	keg	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	34.413.000	33.881.350							
	<u>Keluaran (Output):</u> Evaluasi hasil pelaksanaan pemeriksaan Larwasda (Gelar pengawasan) <u>Hasil (Outcome):</u> Peningkatan fungsi pengendalian SKPD			1	1	keg	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.09	Evaluasi LAKIP	46.477.000	36.595.060							
	<u>Keluaran (Output):</u> Tersusunnya evaluasi lakip dan risalah evaluasi lakip <u>Hasil (Outcome):</u> Peningkatan kinerja unit kerja			2	2	keg	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.10	Review Laporan Keuangan	45.557.000	39.983.200							
	<u>Keluaran (Output):</u> laporan review LKPD SKPD dan laporan risalah hasil review <u>Hasil (Outcome):</u> Review laporan keuangan			2	2	buku	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.11	Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)	19.551.000	7.823.800							
	<u>Keluaran (Output):</u> Laporan LP2P PNS Gol. IIIa ke atas <u>Hasil (Outcome):</u> Tertib Pengelolaan Perpajakan			3.200	1875	lap	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.23	Monitoring, evaluasi dan pemantauan pencegahan dan pemberantasan korupsi	45.115.000	39.209.850							
	<u>Keluaran (Output):</u> Laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi <u>Hasil (Outcome):</u> Terlaksananya pengendalian tindakan yang menjurus korupsi			4	4	lap	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.24	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	36.000.000	22.311.200							
	<u>Keluaran (Output):</u> Laporan pemantauan LHKPN Pejabat eselon II dan Validasi LHKASN pejabat Fungsional, Eselon III, dan IV <u>Hasil (Outcome):</u> Peningkatan tertib administrasi pejabat negara			560	560	orang	100	100	%	

4.02.4.02.01.15.18	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	46.032.000	39.481.700							
	<u>Keluaran (Output):</u> Penyusunan laporan SKPD pelayanan publik dan laporan PMPRB <u>Hasil (Outcome):</u> Peningkatan kinerja SKPD pelayanan publik			3	3	lap	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.20	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	51.827.000	42.443.710							
	<u>Keluaran (Output):</u> Sosialisasi dan dianostig assesment penerapan SPIP <u>Hasil (Outcome):</u> Terlaksananya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			2	2	lap	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.21	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	60.220.000	48.730.200							
	<u>Keluaran (Output):</u> Aktualisasi dan sinkronisasi laporan keuangan /neraca SKPD <u>Hasil (Outcome):</u> Peningkatan pengelolaan laporan keuangan			12	12	lap	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.25	Penyelesaian Kerugian Negara	203.386.000	148.177.900							
	<u>Keluaran (Output):</u> Laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara <u>Hasil (Outcome):</u> Proses penyelesaian piutang kerugian negara			4	4	lap	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.32	Pemantauan dan evaluasi gratifikasi	38.825.000	32.842.650							
	<u>Keluaran (Output):</u> Sosialisasi dan pemantauan gratifikasi <u>Hasil (Outcome):</u> Pencegahan dan pemberantasan korupsi			1	1	keg	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.33	Review dokumen perencanaan dan penganggaran	38.333.000	28.875.000							
	<u>Keluaran (Output):</u> Laporan hasil reuiu RPA dan RKPA SKPD <u>Hasil (Outcome):</u> Data sinkronisasi belanja aset pemerintah kota magelang			2	2	lap	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.34	review pengadaan Barang / Jasa dan penyerapan anggaran	24.753.000	15.694.600							
	<u>Keluaran (Output):</u> Laporan hasil reuiu PBJ <u>Hasil (Outcome):</u> Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah kota magelang			4	4	lap	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.35	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi sapu bersih pungli	125.279.000	106.594.000							
	<u>Keluaran (Output):</u> Laporan satgas sarber pungli <u>Hasil (Outcome):</u> Pencegahan, penindakan dan pemberantasan pungli di lingkungan aratur negara			6	6	lap	100	100	%	
4.02.4.02.01.16	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	189.426.000	139.098.000							
4.02.4.02.01.16.03	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	36.426.000	29.916.800							

	<u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah laporan angka kredit auditor dan P2UPD <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan kinerja pejabat fungsional auditor dan P2UPD			18	16	JFU	100		%	
4.02.4.02.01.16.06	Peningkatan kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah	153.000.000	109.181.200							
	<u>Keluaran (Output) :</u> jumlah peserta pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat pengawasan <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan SDM aparat pengawasan			23	23	peserta	100		%	
4.02.4.02.01.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	20.530.000	14.693.500							
4.02.4.02.01.17.02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	20.530.000	14.693.500							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Tersusnya sistem dan prosedur pengawasan <u>Hasil (Outcome) :</u> Tertib manajemen pengawasan			3	3	lap	100	100	%	
2.10.4.02.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	10.000.000	9.990.000							
2.10.4.02.01.15.19	Pengelolaan Website	10.000.000	9.990.000							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Pengelolaan sarana publikasi <u>Hasil (Outcome) :</u> Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja SKPD			4	4	bl	100	100	%	
Jumlah		2.521.927.000	2.063.846.220							



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN

per 31 Desember 2015

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 26 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 26 . 01 Inspektorat

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			TOTAL	%	SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1.20 . 1.20.26.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	230.584.000,00	49.400.000,00	172.295.638,00	0,00	221.695.638,00	96,15	8.888.362,00
1.20 . 1.20.26.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.450.000,00	0,00	3.435.830,00	0,00	3.435.830,00	99,59	14.170,00
1.20 . 1.20.26.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.000.000,00	0,00	1.944.388,00	0,00	1.944.388,00	64,81	1.055.612,00
1.20 . 1.20.26.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.700.000,00	0,00	4.580.475,00	0,00	4.580.475,00	59,49	3.119.525,00
1.20 . 1.20.26.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	51.710.000,00	49.400.000,00	1.269.850,00	0,00	50.669.850,00	97,99	1.040.150,00
1.20 . 1.20.26.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.000.000,00	0,00	1.985.280,00	0,00	1.985.280,00	99,26	14.720,00
1.20 . 1.20.26.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	2.990.000,00	0,00	2.982.500,00	0,00	2.982.500,00	99,75	7.500,00
1.20 . 1.20.26.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.200.000,00	0,00	4.167.605,00	0,00	4.167.605,00	99,23	32.395,00
1.20 . 1.20.26.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	75,83	725.000,00
1.20 . 1.20.26.01 . 01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	581.000,00	0,00	581.000,00	0,00	581.000,00	100,00	0,00
1.20 . 1.20.26.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	15.138.000,00	0,00	14.749.360,00	0,00	14.749.360,00	97,43	388.640,00
1.20 . 1.20.26.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	136.815.000,00	0,00	134.324.350,00	0,00	134.324.350,00	98,18	2.490.650,00
1.20 . 1.20.26.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	253.315.000,00	0,00	132.649.531,00	105.770.000,00	238.419.531,00	94,12	14.895.469,00
1.20 . 1.20.26.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	17.400.000,00	0,00	0,00	17.380.000,00	17.380.000,00	99,89	20.000,00
1.20 . 1.20.26.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	89.000.000,00	0,00	0,00	88.390.000,00	88.390.000,00	99,31	610.000,00
1.20 . 1.20.26.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	133.845.000,00	0,00	119.595.831,00	0,00	119.595.831,00	89,35	14.249.169,00
1.20 . 1.20.26.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.070.000,00	0,00	13.053.700,00	0,00	13.053.700,00	99,88	16.300,00
1.20 . 1.20.26.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	39.551.000,00	11.250.000,00	18.059.750,00	0,00	29.309.750,00	74,11	10.241.250,00
1.20 . 1.20.26.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000,00	1.950.000,00	3.039.400,00	0,00	4.989.400,00	99,79	10.600,00
1.20 . 1.20.26.01 . 06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1.600.000,00	1.200.000,00	399.500,00	0,00	1.599.500,00	99,97	500,00
1.20 . 1.20.26.01 . 06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.749.000,00	1.200.000,00	546.500,00	0,00	1.746.500,00	99,86	2.500,00
1.20 . 1.20.26.01 . 06.06	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	2.678.000,00	1.650.000,00	919.600,00	0,00	2.569.600,00	95,95	108.400,00
1.20 . 1.20.26.01 . 06.08	Penyusunan RKA-SKPD	15.671.000,00	3.900.000,00	11.753.250,00	0,00	15.653.250,00	99,89	17.750,00
1.20 . 1.20.26.01 . 06.09	Penyusunan LAKIP SKPD	2.853.000,00	1.350.000,00	1.401.500,00	0,00	2.751.500,00	96,44	101.500,00
1.20 . 1.20.26.01 . 06.10	Penyusunan Renstra SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.20 . 1.20.26.01 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.206.573.000,00	787.777.500,00	245.572.157,00	0,00	1.033.349.657,00	85,64	173.223.343,00
1.20 . 1.20.26.01 . 20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	369.154.000,00	322.490.000,00	24.093.950,00	0,00	346.583.950,00	93,89	22.570.050,00
1.20 . 1.20.26.01 . 20.02	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	86.810.000,00	63.800.000,00	6.032.725,00	0,00	69.832.725,00	80,44	16.977.275,00
1.20 . 1.20.26.01 . 20.05	Inventarisasi temuan pengawasan	21.616.000,00	14.850.000,00	5.827.900,00	0,00	20.677.900,00	95,66	938.100,00

1.20 . 1.20.26.01 . 20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	181.389.000,00	160.737.500,00	19.213.700,00	0,00	179.951.200,00	99,21	1.437.800,00
1.20 . 1.20.26.01 . 20.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	62.054.000,00	21.250.000,00	37.089.700,00	0,00	58.339.700,00	94,01	3.714.300,00
1.20 . 1.20.26.01 . 20.08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	33.283.000,00	7.650.000,00	25.287.900,00	0,00	32.937.900,00	98,96	345.100,00
1.20 . 1.20.26.01 . 20.09	Evaluasi LAKIP	18.105.000,00	11.500.000,00	4.569.700,00	0,00	16.069.700,00	88,76	2.035.300,00
1.20 . 1.20.26.01 . 20.10	Review Laporan Keuangan	24.600.000,00	15.500.000,00	6.847.600,00	0,00	22.347.600,00	90,84	2.252.400,00
1.20 . 1.20.26.01 . 20.11	Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)	21.287.000,00	5.200.000,00	12.561.300,00	0,00	17.761.300,00	83,44	3.525.700,00
1.20 . 1.20.26.01 . 20.12	Kormonev Inpres No. 5 Tahun 2004	43.944.000,00	21.400.000,00	20.985.100,00	0,00	42.385.100,00	96,45	1.558.900,00
1.20 . 1.20.26.01 . 20.17	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	25.620.000,00	11.350.000,00	7.736.650,00	0,00	19.086.650,00	74,50	6.533.350,00
1.20 . 1.20.26.01 . 20.18	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	47.253.000,00	15.500.000,00	26.727.300,00	0,00	42.227.300,00	89,36	5.025.700,00
1.20 . 1.20.26.01 . 20.19	Validasi Belanja Barang / Jasa dan Belanja Modal	15.556.000,00	8.850.000,00	5.939.900,00	0,00	14.789.900,00	95,08	766.100,00
1.20 . 1.20.26.01 . 20.20	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	60.829.000,00	21.250.000,00	33.017.275,00	0,00	54.267.275,00	89,21	6.561.725,00
1.20 . 1.20.26.01 . 20.21	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	24.500.000,00	19.050.000,00	4.996.850,00	0,00	24.046.850,00	98,15	453.150,00
1.20 . 1.20.26.01 . 20.25	Penyelesaian Kerugian Negara	170.573.000,00	67.400.000,00	4.644.607,00	0,00	72.044.607,00	42,24	98.528.393,00
1.20 . 1.20.26.01 . 21	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparaturnya	19.495.000,00	9.600.000,00	7.736.600,00	0,00	17.336.600,00	88,93	2.158.400,00
1.20 . 1.20.26.01 . 21.03	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	19.495.000,00	9.600.000,00	7.736.600,00	0,00	17.336.600,00	88,93	2.158.400,00
1.20 . 1.20.26.01 . 22	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	11.000.000,00	9.700.000,00	1.116.750,00	0,00	10.816.750,00	98,33	183.250,00
1.20 . 1.20.26.01 . 22.02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	11.000.000,00	9.700.000,00	1.116.750,00	0,00	10.816.750,00	98,33	183.250,00
1.25 . 1.20.26.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	15.000.000,00	14.400.000,00	600.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00
1.25 . 1.20.26.01 . 15.19	Pengelolaan Website	15.000.000,00	14.400.000,00	600.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	1.775.518.000,00	882.127.500,00	578.030.426,00	105.770.000,00	1.565.927.926,00	88,20	209.590.074,00

MAGELANG, 1 Januari 2015
Inspektur Kota Magelang

Drs. DJATMO WAHYUDI
NIP. 195811151985031014

DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		KET
		ANGGARAN (RP)	RALISASI(RP)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		282.095.000,00	250.318.000,00	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	2.545.500,00	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	11.000.000,00	4.353.200,00	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.800.000,00	4.611.800,00	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	60.000.000,00	55.087.000,00	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.500.000,00	2.468.900,00	
6	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	9.927.500,00	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000,00	4.623.650,00	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	4.864.600,00	
9	Penyediaan bahan logistik kantor	815.000,00	690.000,00	
10	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000,00	26.487.850,00	
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar	134.980.000,00	134.658.000,00	
Program peningkatan sarana dan prasarana		330.913.000,00	295.085.130,00	
12	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	108.883.000,00	103.073.900,00	
13	Pengadaan peralatan gedung kantor	45.750.000,00	44.502.500,00	
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.000.000,00	8.985.000,00	
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	144.715.000,00	117.774.730,00	
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	22.565.000,00	20.749.000,00	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		38.074.000,00	37.008.700,00	
17	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	11.074.000,00	10.901.000,00	
18	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi	2.000.000,00	1.941.700,00	
19	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.000.000,00	2.941.500,00	
20	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	4.000.000,00	3.981.500,00	
21	Penyusunan RKA-SKPD	15.000.000,00	14.262.000,00	
22	Penyusunan LAKIP / lkjip SKPD	3.000.000,00	2.981.000,00	
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan		1.650.889.000,00	1.317.652.890,00	
23	Pelaksanaan pengawasan internal secara	380.032.000,00	292.289.150,00	
24	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan	107.053.000,00	53.974.200,00	
25	Inventarisasi temuan pengawasan	45.248.000,00	31.650.500,00	
26	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	224.662.000,00	224.114.200,00	
27	Koordinasi pengawasan yang lebih	78.126.000,00	72.980.620,00	
28	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	34.413.000,00	33.881.350,00	
29	Evaluasi LAKIP	46.477.000,00	36.595.060,00	
30	Review Laporan Keuangan	45.557.000,00	39.983.200,00	
31	Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)	19.551.000,00	7.823.800,00	
32	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi	46.032.000,00	39.481.700,00	
33	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	51.827.000,00	42.443.710,00	
34	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	60.220.000,00	48.730.200,00	
35	Monitoring, evaluasi dan pemantauan	45.115.000,00	39.209.850,00	
36	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan	36.000.000,00	22.311.200,00	
37	Penyelesaian Kerugian Negara	203.386.000,00	148.177.900,00	
38	Pemantauan dan evaluasi gratifikasi	38.825.000,00	32.842.650,00	
39	review dokumen perencanaan dan	38.333.000,00	28.875.000,00	
40	Review pengadaan barang/jasa dan penyerapan anggaran	24.753.000,00	15.694.600,00	
41	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi sapu bersih pungli	125.279.000,00	106.594.000,00	
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan		189.426.000,00	139.098.000,00	
42	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional	36.426.000,00	29.916.800,00	
43	Peningkatan kasitas aparat pengawasan intern pemerintah	153.000.000,00	109.181.200,00	
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		20.530.000,00	14.693.500,00	
44	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur	20.530.000,00	14.693.500,00	

<i>Program Pengembangan Komunikasi,</i> 45 Pengelolaan Website	<i>10.000.000,00</i> 10.000.000,00	<i>9.990.000,00</i> 9.990.000,00
JUMLAH	2.521.927.000,00	2.063.846.220,00

INSPEKTUR
KOTA MAGELANG

Drs.DJATMO WAHYUDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19581115 198503 1 014

**DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET (RP)	REALISASI (RP)	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		282.095.000,00	250.318.000,00	88,74
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	2.545.500,00	84,85
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	11.000.000,00	4.353.200,00	39,57
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.800.000,00	4.611.800,00	52,41
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	60.000.000,00	55.087.000,00	91,81
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.500.000,00	2.468.900,00	98,76
6	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	9.927.500,00	99,28
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000,00	4.623.650,00	77,06
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	5.000.000,00	4.864.600,00	97,29
9	Penyediaan bahan logistik kantor	815.000,00	690.000,00	84,66
10	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000,00	26.487.850,00	66,22
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar	134.980.000,00	134.658.000,00	99,76
Program peningkatan sarana dan prasarana		330.913.000,00	295.085.130,00	89,17
12	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	108.883.000,00	103.073.900,00	94,66
13	Pengadaan peralatan gedung kantor	45.750.000,00	44.502.500,00	97,27
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.000.000,00	8.985.000,00	99,83
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	144.715.000,00	117.774.730,00	81,38
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	22.565.000,00	20.749.000,00	91,95
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		38.074.000,00	37.008.700,00	97,20
17	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	11.074.000,00	10.901.000,00	98,44
18	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi	2.000.000,00	1.941.700,00	97,09
19	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.000.000,00	2.941.500,00	98,05
20	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	4.000.000,00	3.981.500,00	99,54
21	Penyusunan RKA-SKPD	15.000.000,00	14.262.000,00	95,08
22	Penyusunan LAKIP / lkjip SKPD	3.000.000,00	2.981.000,00	99,37
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan		1.650.889.000,00	1.317.652.890,00	79,81
23	Pelaksanaan pengawasan internal secara	380.032.000,00	292.289.150,00	76,91
24	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan	107.053.000,00	53.974.200,00	50,42
25	Inventarisasi temuan pengawasan	45.248.000,00	31.650.500,00	69,95
26	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	224.662.000,00	224.114.200,00	99,76
27	Koordinasi pengawasan yang lebih	78.126.000,00	72.980.620,00	93,41
28	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	34.413.000,00	33.881.350,00	98,46
29	Evaluasi LAKIP	46.477.000,00	36.595.060,00	78,74
30	Review Laporan Keuangan	45.557.000,00	39.983.200,00	87,77
31	Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)	19.551.000,00	7.823.800,00	40,02
32	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi	46.032.000,00	39.481.700,00	85,77
33	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	51.827.000,00	42.443.710,00	81,89
34	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	60.220.000,00	48.730.200,00	80,92
35	Monitoring, evaluasi dan pemantauan	45.115.000,00	39.209.850,00	86,91
36	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan	36.000.000,00	22.311.200,00	61,98
37	Penyelesaian Kerugian Negara	203.386.000,00	148.177.900,00	72,86
38	Pemantauan dan evaluasi gratifikasi	38.825.000,00	32.842.650,00	84,59
39	review dokumen perencanaan dan	38.333.000,00	28.875.000,00	75,33
40	Review pengadaan barang/jasa dan penyerapan	24.753.000,00	15.694.600,00	63,40
41	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi sapu	125.279.000,00	106.594.000,00	85,09
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		189.426.000,00	139.098.000,00	73,43
42	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional	36.426.000,00	29.916.800,00	82,13
43	Peningkatan kasitas aparat pengawasan intern	153.000.000,00	109.181.200,00	71,36
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		20.530.000,00	14.693.500,00	71,57
44	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur	20.530.000,00	14.693.500,00	71,57
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi		10.000.000,00	9.990.000,00	99,90
45	Pengelolaan Website	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90
JUMLAH		2.521.927.000,00	2.063.846.220,00	81,84

INSPEKTUR
KOTA MAGELANG

Drs.DJATMO WAHYUDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19581115 198503 1 014

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	282.095.000	250.318.000							
4.02.4.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	2.545.500							
	<u>Keluaran (Output) :</u> jumlah surat yang dapat diselesaikan <u>Hasil (Outcome) :</u> Tertib pengelolaan administrasi surat menyurat			925	1231	surat	100	100	%	
4.02.4.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11.000.000	4.353.200							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Biaya langganan telepon <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas			12	12	bulan	100	100	%	
4.02.4.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.800.000	4.611.800							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah pajak kendaraan dinas <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas			16	16	unit	100	100	%	
4.02.4.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	60.000.000	55.087.000							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah honorarium pengelolaan keuangan SKPD <u>Hasil (Outcome) :</u> Tertib administrasi keuangan			12	12	bulan	100	100	%	
4.02.4.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.500.000	2.468.900							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah sarana prasarana kebersihan kantor <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan kenyamanan kantor			15	15	jenis	100	100	%	
4.02.4.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000	9.927.500							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah alat tulis kantor			14	14	jenis				

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Hasil (Outcome): Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas						100	100	%	
4.02.4.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000	4.623.650							
	Keluaran (Output): Jumlah cetakan dan penggandaan Hasil (Outcome): Peningkatan tertib administrasi pengelolaan naskah dinas			3	3	jenis	100	100	%	
4.02.4.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000	4.864.600							
	Keluaran (Output): Jumlah langganan surat kabar Hasil (Outcome): Peningkatan pengetahuan /informasi aparat pengawasan			44	44	jenis	100	100	%	
4.02.4.02.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	815.000	690.000							
	Keluaran (Output): Jumlah pengisian tabung gas Hasil (Outcome): Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas			6	6	kali	100	100	%	
4.02.4.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000	26.487.850							
	Keluaran (Output): Jumlah jamuan makan dan minum pegawai dan tamu kantor Hasil (Outcome): Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas			21	21	keg	100	100	%	
4.02.4.02.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	134.980.000	134.658.000							
	Keluaran (Output): Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil (Outcome): Peningkatan kinerja			13	13	keg	100	100	%	
4.02.4.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	330.913.000	295.085.130							

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.4.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	108.883.000	103.073.900							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya perlengkapan gedung kantor <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas			39	39	unit	100	100	%	
4.02.4.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	45.750.000	44.502.500							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya pengadaan peralatan berupa laptop <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas			5	5	unit	100	100	%	
4.02.4.02.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.000.000	8.985.000							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah pengadaan /pemeliharaan tanaman hias dan perlengkapannya <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan kenyamanan dan keindahan ruangan kantor			9	9	jenis	100	100	%	
4.02.4.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	144.715.000	117.774.730							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas			20	20	unit	100	100	%	
4.02.4.02.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	22.565.000	20.749.000							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Terpeliharanya peralatan kantor <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas			42	42	jenis	100	100	%	
4.02.4.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	38.074.000	37.008.700							
4.02.4.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11.074.000	10.901.000							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah laporan capaian kinerja			4	4	lap				

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Hasil (<i>Outcome</i>): Evaluasi dan peningkatan kinerja						100	100	%	
4.02.4.02.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.000.000	1.941.700							
	Keluaran (<i>Output</i>): Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Hasil (<i>Outcome</i>): Tertib pengelolaan administrasi anggaran dan keuangan			1	1	bendel	100	100	%	
4.02.4.02.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.000.000	2.941.500							
	Keluaran (<i>Output</i>): Jumlah laporan akhir tahun Hasil (<i>Outcome</i>): Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan			1	1	buku	100	100	%	
4.02.4.02.01.06.06	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	4.000.000	3.981.500							
	Keluaran (<i>Output</i>): Jumlah laporan renja Hasil (<i>Outcome</i>): Peningkatan kinerja dan tertib pengelolaan perencanaan SKPD			2	2	dok	100	100	%	
4.02.4.02.01.06.08	Penyusunan RKA-SKPD	15.000.000	14.262.000							
	Keluaran (<i>Output</i>): Jumlah RKA dan RKPA SKPD Hasil (<i>Outcome</i>): Tertib pengelolaan perencanaan anggaran SKPD			2	2	dok	100	100	%	
4.02.4.02.01.06.27	Penyusunan LAKIP SKPD	3.000.000	2.981.000							
	Keluaran (<i>Output</i>): Tersusnya buku LAKIP SKPD Hasil (<i>Outcome</i>): Peningkatan kinerja SKPD			1	1	buku	100	100	%	
4.02.4.02.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.650.889.000	1.317.652.890							
4.02.4.02.01.15.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	380.032.000	292.289.150							
	Keluaran (<i>Output</i>):									

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah obyek pemeriksaan (obrik) <u>Hasil (Outcome):</u> Peningkatan kinerja SKPD			80	77	obrik	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.02	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	107.053.000	53.974.200							
	<u>Keluaran (Output):</u> Jumlah obyek pemeriksaan (obrik) <u>Hasil (Outcome):</u> Peningkatan kinerja SKPD dan disiplin PNS			12	8	obrik	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.05	Inventarisasi temuan pengawasan	45.248.000	31.650.500							
	<u>Keluaran (Output):</u> Pemutakhiran data tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK <u>Hasil (Outcome):</u> Terselesaikannya Tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK (murni /tahun berjalan)			3	3	kegiatan	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	224.662.000	224.114.200							
	<u>Keluaran (Output):</u> Data pendukung tindak lanjut rekomendasi inspektorat kota Inspektorat Provinsi dan pending BPK serta sosialisasi Sin Was Online <u>Hasil (Outcome):</u> Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan			1.000	842	rekomendasi	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	78.126.000	72.980.620							
	<u>Keluaran (Output):</u> Sinkronisasi tindak lanjut pengawasan <u>Hasil (Outcome):</u> Pemahaman tindak lanjut atas hasil pemeriksaan			4	4	keg	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	34.413.000	33.881.350							
	<u>Keluaran (Output):</u> Evaluasi hasil pelaksanaan pemeriksaan Larwasda (Gelar pengawasan) <u>Hasil (Outcome):</u> Peningkatan fungsi pengendalian SKPD			1	1	keg	100	100	%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.4.02.01.15.09	Evaluasi LAKIP	46.477.000	36.595.060							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Tersusunnya evaluasi lakip dan risalah evaluasi lakip <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan kinerja unit kerja			2	2	keg	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.10	Review Laporan Keuangan	45.557.000	39.983.200							
	<u>Keluaran (Output) :</u> laporan review LKPD SKPD dan laporan risalah hasil review <u>Hasil (Outcome) :</u> Review laporan keuangan			2	2	buku	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.11	Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)	19.551.000	7.823.800							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Laporan LP2P PNS Gol. IIIa ke atas <u>Hasil (Outcome) :</u> Tertib Pengelolaan Perpajakan			3.200	1875	lap	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.23	Monitoring, evaluasi dan pemantauan pencegahan dan pemberantasan korupsi	45.115.000	39.209.850							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi <u>Hasil (Outcome) :</u> Terlaksananya pengendalian tindakan yang menjurus korupsi			4	4	lap	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.24	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	36.000.000	22.311.200							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Laporan pemantauan LHKPN Pejabat eselon II dan Validasi LHKASN pejabat Fungsional, Eselon III, dan IV <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan tertib administrasi pejabat negara			560	560	orang	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.18	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	46.032.000	39.481.700							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Penyusunan laporan SKPD pelayanan publik dan laporan PMPRB <u>Hasil (Outcome) :</u>			3	3	lap				

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan kinerja SKPD pelayanan publik						100	100	%	
4.02.4.02.01.15.20	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	51.827.000	42.443.710							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Sosialisasi dan dianostig assesment penerapan SPIP <u>Hasil (Outcome) :</u> Terlaksananya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			2	2	lap	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.21	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	60.220.000	48.730.200							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Aktualisasi dan sinkronisasi laporan keuangan /neraca SKPD <u>Hasil (Outcome) :</u> Peningkatan pengelolaan laporan keuangan			12	12	lap	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.25	Penyelesaian Kerugian Negara	203.386.000	148.177.900							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara <u>Hasil (Outcome) :</u> Proses penyelesaian piutang kerugian negara			4	4	lap	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.32	Pemantauan dan evaluasi gratifikasi	38.825.000	32.842.650							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Sosialisasi dan pemantauan gratifikasi <u>Hasil (Outcome) :</u> Pencegahan dan pemberantasan korupsi			1	1	keg	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.33	Review dokumen perencanaan dan penganggaran	38.333.000	28.875.000							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Laporan hasil reuiu RPA dan RKPA SKPD <u>Hasil (Outcome) :</u> Data sinkronisasi belanja aset pemerintah kota magelang			2	2	lap	100	100	%	
4.02.4.02.01.15.34	review pengadaan Barang / Jasa dan penyerapan anggaran	24.753.000	15.694.600							
	<u>Keluaran (Output) :</u> Laporan hasil reuiu PBJ			4	4	lap				

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Hasil (<i>Outcome</i>): Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah kota magelang						100	100	%	
4.02.4.02.01.15.35	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi sapu bersih pungli	125.279.000	106.594.000							
	Keluaran (<i>Output</i>): Laporan satgas sarber pungli Hasil (<i>Outcome</i>): Pencegahan, penindakan dan pemberantasan pungli di lingkungan aratur negara			6	6	lap	100	100	%	
4.02.4.02.01.16	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	189.426.000	139.098.000							
4.02.4.02.01.16.03	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	36.426.000	29.916.800							
	Keluaran (<i>Output</i>): Jumlah laporan angka kredit auditor dan P2UPD Hasil (<i>Outcome</i>): Peningkatan kinerja pejabat fungsional auditor dan P2UPD			18	16	JFU	100		%	
4.02.4.02.01.16.06	Peningkatan kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah	153.000.000	109.181.200							
	Keluaran (<i>Output</i>): jumlah peserta pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat pengawasan Hasil (<i>Outcome</i>): Peninbgkatan SDM aparat pengawasan			23	23	peserta	100		%	
4.02.4.02.01.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	20.530.000	14.693.500							
4.02.4.02.01.17.02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	20.530.000	14.693.500							
	Keluaran (<i>Output</i>): Tersusnya sistem dan prosedur pengawasan Hasil (<i>Outcome</i>): Tertib managemen pengawasan			3	3	lap	100	100	%	
2.10.4.02.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	10.000.000	9.990.000							
2.10.4.02.01.15.19	Pengelolaan Website	10.000.000	9.990.000							
	Keluaran (<i>Output</i>):									

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengelolaan sarana publikasi Hasil (<i>Outcome</i>): Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja SKPD			4	4	bl	100	100	%	
Jumlah		2.521.927.000	2.063.846.220							

Magelang, Desember 2017
Inspektur Kota Magelang

Drs. DJATMO WAHYUDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19581115 198503 1 014